



2024

RANCANGAN AKHIR RENJA PD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusunan Renja PD ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari renja ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran Program dan kegiatan Dinas Perhubungan masa yang akan datang, kami berharap adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Demikian Renja PD Dinas Perhubungan ini kami buat semoga bermanfaat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah	6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	20
---------------------	----

BAB IV PENUTUP.....	29
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada

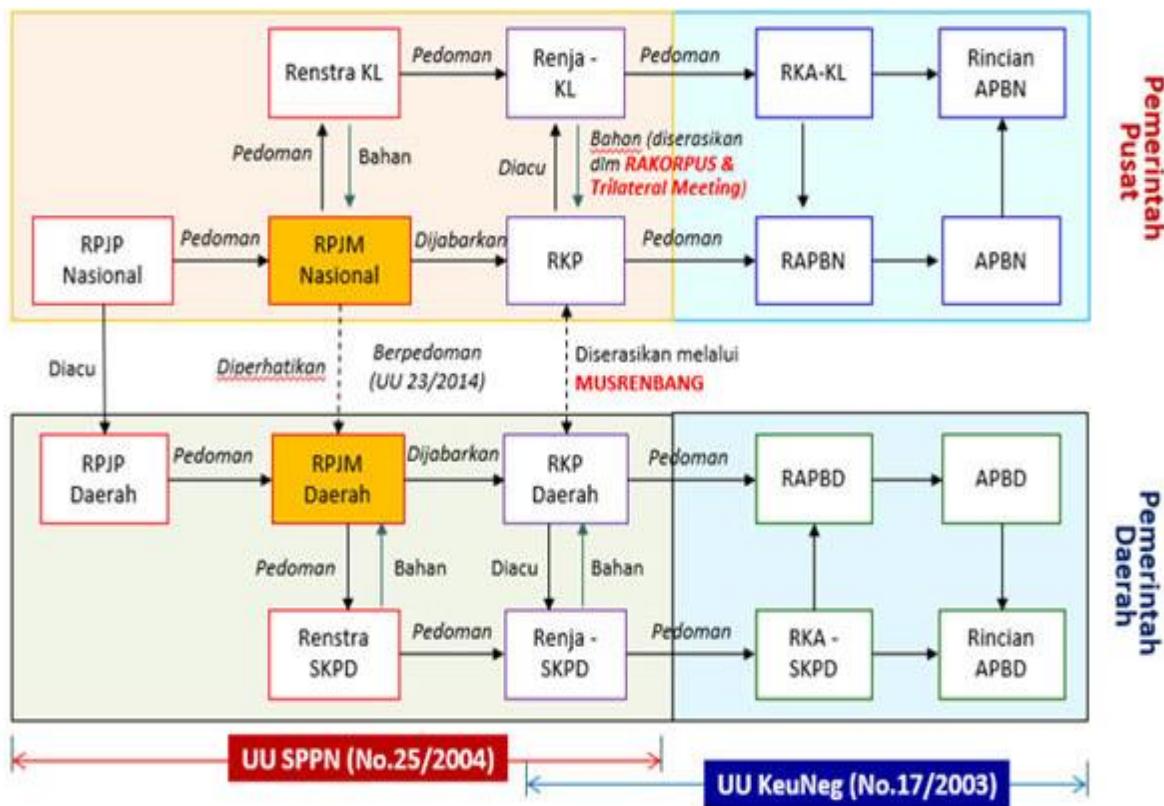
tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga di integrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Prioritas Pembangunan pemerintah Pusat untuk saat ini dititik beratkan pada Perhubungan laut, yang mana di Kabupaten Pasaman Barat dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang yang merupakan isu strategis infrastruktur pelayanan Laut pada masa yang akan datang. Status Pelabuhan teluk Tapang merupakan pelabuhan pengumpul yang kewenangannya berada pada Kementerian Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Psaman Barat Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Perhubungan lebih menitikberatkan pada pelayanan angkutan jalan yaitu penyediaan jaringan angkutan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, peningkatan sumber daya manusia dan keselamatan.

Tabel 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Secara Hierarki



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Sebagai acuan dalam menyusun jaringan pelayanan angkutan jalan yaitu tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Kab/Kota sesuai dengan Tratalok Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menjamin tercapainya jaringan sarana dan prasarana jalan berupa tersedianya halte dan terminal di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk menjamin tercapainya fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan quardrill serta Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten.
5. Untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang handal di bidang perhubungan.
6. Untuk menjamin meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan Bermotor dengan tersedianya alat uji yang berbasis IT.
7. Untuk menjamin keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten.
8. Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai ada evaluasi kinerja;

9. Sebagai dokumen acuan/guideline (pedoman) bagi capaian indikator kinerja daerah dalam rentang waktu perencanaan jangka menengah Kepala Daerah terpilih (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 untuk target capaian Visi Misinya.

1.4 Sistematika Dokumen Renja PD

Sistematika penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan rencana Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 memiliki Visi “ *Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan Demi Kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat*” sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Mengembangkan SDM Aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan memberdayakan potensi masyarakat yang turut serta dalam mewujudkan pelayanan prima di bidang perhubungan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan Daerah.

Untuk mencapai Visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 melaksanakan 1 urusan 4 Program dan 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.647.018.863	-	2.421.290.788	52,10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.021.198.318	-	2.155.049.012	53,59
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.522.576.818	57,14	1.935.349.012	54,94
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.004.000	50,00	183.900.000	44,85
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.617.500	50,00	35.800.000	40,40

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.900.000	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18.900.000	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.480.800	-	103.194.996	47,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.300.000	70,00	635.000	48,85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.465.800	50,00	14.715.500	40,35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.715.000	55,00	87.844.496	49,43
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	8.985.000	-	8.985.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.985.000	100,00	8.985.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.650.500	-	22.325.700	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.191.600	58,33	22.325.700	47,31
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	337.804.245	-	131.736.080	39,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.562.500	55,00	63.630.200	51,50
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	13.930.000	55,00	6.050.000	43,43
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	145.656.950	50,00	60.802.950	41,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.045.295	50,00	1.252.930	5,21
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.645.126.000	-	1.061.664.325	64,53
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	765.363.500	-	690.268.525,00	90,19
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	618.721.000	100,00	617.412.525	99,79
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	146.642.500	60,00	72.856.000	49,68
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	91.154.000	-	30.344.400	33,29
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terminal Tipe C	91.154.000	55,00	30.344.400	33,29
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	230.543.500	-	89.976.700,00	39,03
	Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermototr'	81.000.000	80,00	53.950.000	66,60

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	96.850.000	52,00	28.750.000	29,69
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.700.000	50,00	700.000	2,72
	Koordinasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.993.500	60,00	6.576.700	24,36
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/Kota	248.507.000	-	104.142.600	41,91
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	248.507.000	65,00	104.142.600	41,91
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	309.558.000	-	146.932.100	47,47
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	309.558.000	65,00	146.932.100	47,47
	Program Pengelolaan Pelayaran	165.036.000	-	36.410.200	22,06
	Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kab/kota	165.036.000	-	36.410.200	22,06
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.036.000	54,50	36.410.200	22,06
JUMLAH		6.457.180.863	61,00	3.519.365.313	54,50

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggungjawab organisasi, secara keseluruhan rata – rata capaian kinerja sampai bulan juni 2024 adalah sebesar 54,50 %.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga harus dilakukan evaluasi, karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Juni 2024, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi Tahun 2024 dan hasil pencapaian Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2(T-C.30).
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
 Kabupaten Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM/ SN	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun n-1 (2024)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Rasio Konektifitas Kabupaten		v	1,9	2	2,1	2,1	0,79	2	2,1	2,1	
2	Persentase layanan angkutan darat			45%	50%	50%	60%	30%	50%	50%	60%	
3	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota			0,5	0,5	0,4	0,4	0,54	0,5	0,4	0,4	
4	% Penurunan TemuanBPK			3%	2%	1%	0%	2%	2%	1%	0%	
5	Nilai SAKIP			70	70	80	80	68,3	70	80	80	
6	Level Maturitas SPIP			3	4	4	4	3	4	4	4	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berupaya untuk proaktif, kreatif, inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat antara lain :

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Sesuai dengan Perda no 12 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pasaman Barat Sisten jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri atas, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas jaringan jalan, jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Jaringan Layanan Lalu Lintas. Yang tersedia saat ini sebbagai berikut :

1. Jaringan Prasarana Lalu lintas yaitu terdiri dari terminal
 - a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Simpang Ampek
 - b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Ujuang Gadiang
 - c. Terminal Barang terdapat di Simpang Ampek, Aia Bangih, Kinali
Yang aktif saat ini hanya terminal penumpang simpang empat tipe C.
2. Jaringan Layanan Lalu Lintas yang terdiri dari trayek angkutan penumpang dan trayek angkutan barang, yang terdiri dari :
 - a. Trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas
 - ✓ Simpang Ampek- Sidempuan- Medan
 - ✓ Simpang Ampek- Pekan Baru- Medan
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas
 - ✓ Simpang Ampek- Pariaman- Padang
 - ✓ Simpang Ampek- Lubuak Basuang- Bukittinggi
 - ✓ Simpang Ampek- Panti- Lubuak Sikapiang
 - ✓ Simpang Ampek- Panti- Rao
 - ✓ Simpang Ampek- Kumpulan- Lubuak Sikapiang
- Sejak Tahun 2016 telah beroperasi angkutan Bus Sekolah bantuan dari DAK, yang mana operasionalnya dari APBD yang terdiri dari 11 bus dengan rute sebagai berikut :
 1. Kecamatan Kinali
 - a) Pasar Durian Kilangan – Lubuk Karak – SMP N 1 Kinali – Alamanda – Pasar Padang Canduah – Sidodadi – SMPN 7 Kinali.

- b) Kantor Camat Knali – Pasar Durian Kilangan – Base Camp – Aia Aru – Kapunduang – SMK 1 Kinali.
 - c) Pasar Durian Kilangan – Kampung Dalam – Kampung Kinali – Bancah Basuang – Silambau.
2. Kecamatan Talamu
- a) Sungai Abuak – Pasa Kajai – Jembatan Panjang – Pasanggiang – Pasar Talu – Sianok – SMA N 1 Talamau – Taluak Ambun – MTSN Sinuruik.
 - b) Gantiang – Kampuang Pinang – Sungai Janiah – Kampuang Kandih – Rumbbai – Aia Angek – Taluak Ambun – MTSN Sinuruik.
 - c) Tinggam – Sinuruik – SMPN 1 Talamau – Pasar Talu – Taluak Ambun - MTSN Talamau.
3. Bateh Pulai – Pinagar – Pasar Padang Tujuh – Tapalan – Simpang Kampung Cubadak – Jalan Jati – Simpang Yarsi – Halte Masjid Agung – Simpang Pasaman Baru – Bundaran Simpang Empat – MTSN Simpang empat – SMK Cirsak Kapa.
4. Batang saman – Batang Umpai – Batang Lingkin- Simpang Pasaman Baru- Halte Depan Masjid Agung Pasaman Baru – Simpang Pasaman Baru – Bundaran simpang Empat – Depan SMA Al – istiqamah.
5. a) Simpang 3 Ophir – Halte Jambak – Simpang Gang Serasi Batang toman – Simpang empat Bundaran – Halte Masjid Agung – Simpang Pasaman Baru - MTSN – SMK Cersa Kapa.
- b) Plasma 4 – Plasma 5 – Plasma 3 – Pengkolan – Puju Rahayu – Ophir – SMP N 1 Luhak Nan Duo – Simpang 3 Ophir – Sariak – SMA N 2 Luhak Nan Duo.
6. Ampar Putih – Air Haji – Sungai aur – Simpang Sontang – Paadang Timbalun – Simpang Tamunarang – Muara Tapus – Pematang Sontang.
7. Paninjoan – Kampung Kajai – Tumbang Jaruang – Lubuak Gantiang – Tampus – MTsN – Simpang PLN – Huta Nagodang – Jl. Halmahera – Lampu Merah – SMA – SMK.
8. Pasar Desa Baru – Simpang Kampung Baru – Simpang silaping – Simpang rao – Rao – SMA N 1 Ranah Batahan – SMK N 1 Ranah Batahan.

9. a. Labuah luruih – Kiawai – Pasar Kiawai – Kampung Alang – Simpang Tigo Alin – SMA N 2 Gunung Tuleh.
b. Rabijonggor – SMA N 2 Gunung Tuleh.
 10. Pasar Sasak – Padang Laban – Padang Silasuang – Anak Aia Rimbo – Kasiak Tinggi – Pisang Hutan – Sialang – Pasar Kapa – SMK Cersa.
 11. Parit – Simpang Bulan – SMA N 1 Parit Koto Balingka.
- Sejak Tahun 2017 telah beroperasi Bus Perintis dengan seluruh biaya dari DITJEN Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh DAMRI dengan rute 5 (lima) trayek perintis yaitu :
 1. Terminal Simpang empat – Mandiangin
 2. Terminal Simpang Empat – Talu (Bateh Samuik)
 3. Terminal Simpang Empat – Sikabau
 4. Terminal Simpang Empat – Desa Baru.
 - Untuk Tahun 2023 hanya satu buah Trayek perintis yang beroperasi yaitu Terminal Simpang Empat - Desa Baru, yang lainnya sudah ditarik sama Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Balai Perhubungan Darat.
 - Fasilitas sarana perhubungan yang tersedia saat ini adalah :
 - a. Halte yang sudah tersedia sampai sekarang ada 6 halte yaitu Halte air haji, Halte Polsek Pasaman, Halte SMA Istiqamah, Halte Jambak (Depan Lapangan Bola), Halte Katimaha, Halte Simpang 4 Batang Umpai.
 - b. Teminal hanya 1 yang aktif yaitu terminal simpang empat sedangkan terminal Talu, Kinali dan ujung gading belum aktif.
 - Sarana dan prasarana angkutan laut Tersedianya 12 Dermaga / Tambatan Perahu. Tersedianya 10 Unit Kapal.
 - Lampu Jalan tersedia 1.250 unit yang menyebar di seluruh Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Peyelenggaraan pelayanan ini brtujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan Uji kendaraan untuk memenuhi syarat laik jalan. Tahun 2021 dari Target 16.946 kendaraan hanya terealisasi 3.419 kendaraan dan pada Tahun 2022 target pelaksanaan Uji Kendaraan adalah 16.946 Kendaraan.

3. Pelayanan Perizinan Angkutan

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait rekomendasi izin trayek, rekomendasi perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor, izin insidentil dan izin usaha angkutan.

Disamping sebagai dinas teknis yang diserahi tugas menyelenggarakan urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga diberi tanggungjawab sebagai salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Parkir ditepi Jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, dan Retribusi Khusus tempat Parkir.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel dibawah :

Tabel 2.3 Target dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15,000,000.00	10,000,000.00	67%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500,000,000.00	0	0%
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	8,800,000.00	11,73%
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	10,000,000.00	0	0%
Jumlah		600,000,000.00	18,800,000.00	3,13%
<i>Sumber: Dinas Perhubungan, per 30 juni 2024</i>				

Target capaian PAD Dinas perhubungan masih jauh dibawah Rata – Rata karena masih adanya kendala – kendala yang ditemui dilapangan diantaranya :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Jalan Propinsi atau jalan negara tidak di perbolehkan untuk dipungut retribusi
 - Jalan kabupaten untuk titik yang berpotensi untuk pemungutan retribusi tidak memungkinkan
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah

3. Target Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
 - Pada tahun 2023 ini peminjam bus berkurang sehingga target tidak tercapai
 - Terkendala dengan hari dan jumlah jam keberangkatan
4. Retribusi Terminal
 - Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah

2.3 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa hal yang menjadi Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dan Pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.
2. Peningkatan pengadaan Infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu, guardraill, APILL, dll) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk menciptakan dan wewujudkan standar keselamatan.
3. Peningkatan pengadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi (HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dll.
4. Peningkatan sarana Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang berbasis IT maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk optimalisasi pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan.
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun, tenggang rasa dijalan juga semakin menipis sehingga berdampak pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.

6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
7. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan antar lembaga untuk penanganan bidang perhubungan laut terutama dalam penanganan lanjutan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sebagai isu strategis infrastruktur pelayanan laut pada masa yang akan datang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Mengusulkan rancangan awal renja terdiri dari 6 (enam) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, sejak Tahun 2020 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penerangan Jalan telah pindah ke Dinas Perhubungan yang sebelumnya berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada BAB IV pasal 26 tentang Perlengkapan Jalan disampaikan bahwa Alat Penerangan Jalan termasuk salah satu perlengkapan jalan.

Alat Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat Penerangan Jalan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 selain program kegiatan rutin pendukung pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga program kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Musrenbang yang terakomodir Dalam
Renja Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Dana	Ket
1.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ					
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota					
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat., Kab. Pasaman Barat		300.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Lubuk Puding Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		100.000.000		

Hasil Musrenbang Kecamatan

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan DPRD yang terakomodir Dalam Renja Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Dana	Ket
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota					
1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jorong Parit, Kecamatan Koto Balingka		50.000.000		
		Jorong Sikabau Kecamatan Koto Balingka		50.000.000		
		Kecamatan Kinali		50.000.000		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka pelaksanaan Rencana Startegis di Tahun ke enam Dinas Perhubungan telah menyusun Program dan kegiatan pada Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 secara rinci dengan pendanaan terdiri dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PERHUBUNGAN							5.147.180.863,00	6.457.180.863,00	6.457.180.863,00	1.310.000.000,00								11.695.000.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.147.180.863,00	6.457.180.863,00	6.457.180.863,00	1.310.000.000,00								11.695.000.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.147.180.863,00	6.457.180.863,00	6.457.180.863,00	1.310.000.000,00								11.695.000.000,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	3.886.544.863,00	4.647.018.863,00	4.782.898.863,00	3.038.455.137,00								6.925.000.000,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				5 dokumen	5 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00								500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase operasional pegawai				100 %	100 %	3.456.491.938,00	4.021.198.318,00	4.127.324.068,00	670.832.130,00								4.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.043.796.938,00	3.522.576.818,00	3.827.912.568,00	584.115.630,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	319.300.000,00	410.004.000,00	405.754.000,00	86.454.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	93.395.000,00	88.817.500,00	93.857.500,00	282.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dibimtek		5 kali	5 kali	7.960.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	10.940.000,00			-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	10 Orang	7.960.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	10.940.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sertase pelaksanaan operasional kantor		100 %	100 %	225.209.000,00	215.480.800,00	245.684.300,00	20.455.300,00			-	-	-	470.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	20 Paket	1.300.000,00	1.300.000,00	1.797.500,00	497.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	36.466.000,00	36.465.800,00	43.985.800,00	7.499.800,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	100 Laporan	187.443.000,00	177.715.000,00	199.901.000,00	12.458.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan perlengkapan dan mesin			10 unit	10 unit	0,00	8.985.000,00	8.985.000,00	8.985.000,00		-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20 Unit	2 Unit	0,00	8.985.000,00	8.985.000,00	8.985.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa penunjang			100 %	100 %	41.998.925,00	44.650.500,00	55.271.250,00	13.272.325,00		-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	41.998.925,00	44.650.500,00	55.271.250,00	13.272.325,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah			150 unit	150 unit	154.885.000,00	337.804.245,00	326.754.245,00	171.889.245,00						655.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			60 Unit	60 Unit	137.405.000,00	154.172.000,00	154.172.000,00	16.767.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit	25 Unit	17.480.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	3.550.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit		0,00	145.656.950,00	134.606.950,00		134.606.950,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	+		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit		0,00	24.045.295,00	24.045.295,00		24.045.295,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	+		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU UNTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Percentase layanan angkutan darat					60 %	60 %	1.160.873.000,00	1.648.126.000,00	1.589.246.000,00		3.419.127.000,00							4.670.000.000,00		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RI LLAJ					1 dokumen	1 dokumen		0,00	0,00	0,00		0,00		+	+	+		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	+		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan					100 unit	100 unit	338.278.000,00	765.363.500,00	765.363.500,00		429.085.500,00			+	+	+		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					20 Unit	20 Unit		0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	+		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					10 Unit	10 Unit	199.923.000,00	618.721.000,00	618.721.000,00		418.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	+			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara			20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara			*	0,0	136.355.000,00	146.642.500,00	146.642.500,00	10.287.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	persentase operasional terminal tipe c			100 %	100 %	88.760.000,00	91.154.000,00	69.054.000,00	-19.706.000,00			*	*	*			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.			10 Orang	10 Orang	88.760.000,00	91.154.000,00	69.054.000,00	-19.706.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji			4000 kendaraan	4000 kendaraan	265.355.000,00	230.543.500,00	196.743.500,00	-68.611.500,00			*	*	*			520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			11 Unit	11 Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			15 Orang	10 Orang	103.750.000,00	96.850.000,00	63.050.000,00	-40.700.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Dokumen Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1000 Dokumen	1000 Dokumen	45.700.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			40 Laporan	40 Laporan	34.905.000,00	26.993.500,00	26.993.500,00	-7.911.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"	"	"	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan			5 kali	5 kali	195.080.000,00	248.507.000,00	248.507.000,00	53.427.000,00			"	"	"	"	"	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"	"	"	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"	"	"	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			"	0 0	195.080.000,00	248.507.000,00	248.507.000,00	53.427.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"	"	"	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalan) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan bus			11 bus	11 bus	0,00	0,00	0,00	0,00			"	"	"	"	"	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0008	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Penetapan Teknis Andalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Isoran Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalain yang terwasi				50 Laporan	50 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-		265.400.000,00	309.558.000,00	309.578.000,00	44.178.000,00		"	"	"		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	12 Unit		265.400.000,00	309.558.000,00	309.578.000,00	44.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAHAN PELAYARAN	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun			600.850 to n,org/tahun	600.850 to n,org/tahun		109.763.000,00	165.036.000,00	85.036.000,00	90.237.000,00							200.000.000,00			
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Izin Persetujuan Pengoperasian kapal			30 unit	30 unit		109.763.000,00	165.036.000,00	85.036.000,00	24.727.000,00		"	"	"			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																				
		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				12 Laporan	12 Laporan		109.763.000,00	165.036.000,00	85.036.000,00	24.727.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	"	"	"		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
		J U M L A H							5.147.180.863,00	6.457.180.863,00	6.457.180.863,00	1.310.000.000,00						11.695.000.000,00				

BAB IV

PENUTUP

Renja PD (Renja Perangkat Daerah) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan,

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta peran aktif *stakeholder* terkait.

Simpang Empat, September 2024
Kepala Dinas Perhubungan



BAKRI SUDDIN, SH
Pembina Tk. I / IV /b
NIP. 19681002 199212 1 001